

## POLITIK

## LINTAS

Perlu Semangat  
Gotong Royong

NASRULLAH MAPPATANG

**SAMARINDA** - Pengamat Sosial Budaya dari Universitas Mulawarman (Unmul), Nasrullah Mappatang mengatakan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memerlukan semangat gotong-royong dari berbagai pihak. Tidak bisa hanya pemerintah, melainkan juga dari masyarakat luas. "Solidaritas sosial tentu sangat penting," kata Nasrullah.

Kendati demikian, yang paling penting dan utama adalah kefokusannya dan keseriusan pemerintah sebagai penanggung jawab. Solidaritas sosial berupa teman bantu teman atau rakyat bantu rakyat adalah sesuatu hal yang sudah mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Selain itu, perlu kesadaran dari yang berkecukupan untuk membantu yang berkekurangan. "Agar tercipta jaring pengaman sosial," tukasnya.

Kalau ini dilakukan secara baik, krisis kesehatan yang terjadi saat ini tidak berlanjut pada krisis ekonomi, kemudian sosial, apalagi sampai krisis politik. "Bantu saudara kita yang kesusahan. Karena jika tidak, kaum berada juga yang akan terkena dampaknya kalau krisis kesehatan ini berlanjut ke krisis ekonomi sosial," paparnya.

Membangun JPS di tengah kesulitan saat ini memang diperlukan dalam rangka mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat berubahnya tatanan sebagai akibat dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi yang bisa berujung krisis sosial dan politik. "Makanya perlu dicegah sedini mungkin secara menyeluruh dengan penanganan serius dan terfokus dari pemerintah dan redistribusi sumber daya dengan kaum berada membantu yang sedang kesusahan," tandasnya.

Selain itu, juga perlu dilakukan realokasi anggaran besar-besaran dan fokus menangani Covid-19 di bidang kesehatan. Perbanyak vaksinasi dan beri makan serta obat-obatan kepada rakyat yang kesulitan. "Kalau bisa hentikan proyek-proyek besar dan memakamkan anggaran besar. Fokus vaksinasi dan kasih makan rakyat yang kesulitan. Kalau tidak begitu, rakyat bisa kelaparan, sulit diatur dan pandemi akan semakin lama ditangani," tambahnya. (ay)

## Rudy Mas'ud Sebut Makmur Salah Alamat

## Ketika Gugatan Disampaikan ke Mahkamah Partai

**SAMARINDA** - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas'ud menganggap langkah yang dilakukan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengugat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait pergantian dirinya dari jabatannya ialah langkah yang tidak tepat. Sebab, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ialah ranah dari DPRD yang susunannya ditentukan oleh DPP. Sedangkan Mahkamah Partai merupakan alat dari internal partai. Sementara di tubuh DPRD memiliki aturan tersendiri.

"Kan salah kalau kebijakan pergeseran dibawa ke Mahkamah Partai," kata Rudy Mas'ud.

Menurutnya, gugatan ke Mahkamah Partai itu dilakukan ketika terjadi sebuah permasalahan antar kader. Berbeda kondisi dengan yang terjadi saat ini, di mana keputusan tersebut merupakan sebuah instruksi partai, bukan sebuah persetujuan antar kader.

"Kan ini instruksi partai, bukan urusan antar kader partai. Toh di

Golkar ada aturannya. Sehingga seluruh kader wajib tunduk terhadap perintah DPP," ucapnya.

Jabatan yang diemban Makmur HAPK merupakan hasil dari kerja keras Partai Golkar di Kaltim, bukan secara individu. Sebab Makmur merupakan bagian dari 12 anggota Partai Golkar yang duduk di DPRD Kaltim. Lagi pula, pergeseran jabatan pimpinan DPRD itu merupakan hal yang biasa terjadi, bukan sebuah hal yang tabu. "Kita perlu energi baru dengan melaksanakan kontrolnya secara lebih bagus," tuturnya.

Sekretaris Praksi Partai Golkar DPRD Kaltim Nidya Listiyono menambahkan, terdapat tata tertib dalam tubuh DPRD. Salah satunya yang mengatur menyangkut pergantian pimpinan DPRD. Tata tertib ini tentunya mengacu pada aturan di atasnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Di mana, terdapat tenggat waktu yang apabila proses gugatan masih berjalan, tetap dilakukan pergantian.

"60 hari secara otomatis dilaku-

kan pergantian," ucapnya.

60 hari ini sudah termasuk dari proses pengajuan hingga penentuan. Misalnya seperti terjadi pengajuan perubahan AKD, terdapat waktu 14 hari untuk kader bersangkutan menerima atau tidak. "60 hari itu masanya. Kan secara kelembagaan DPRD Kaltim tidak bisa tidak menjalankan. Karena ini permintaan dari partai dan yang tandatangani juga langsung dari Ketua Umum dan Sekjen partai," paparnya.

Setiap kader pun kata Tio -sapaan akrab Nidya Listiyono-, sudah seharusnya melaksanakan apa yang menjadi keputusan DPP. Sebab hukumnya wajib untuk dilaksanakan.

Sementara Makmur HAPK yang dikonfirmasi terpisah, enggan berkomentar banyak. Ia hanya menyampaikan bahwa sudah ada



RUDY MAS'UD

MAKMUR HAPK

pengacaranya yang sedang menjalani proses tersebut. "Saya enggak mau komentari itu, dia (Rudy Mas'ud, Red) kan ketua. Silakan saja, kalau dirasa enggak tepat, ya sudah. Kita tetap jalankan itu," ucapnya.

Menurutnya, langkah yang dilakukannya ini sebagai langkah dalam menjaga roh, serta stabilitas partai. "Saya sudah 30 tahun di Golkar. Saya jaga itu," singkatnya.

Diketahui, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menerbitkan surat bernomor B-600/GOLKAR/VI/2021 tentang persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024 tertanggal 16 Juni 2021. Isinya, memutuskan pergantian jabatan posisi pucuk pimpinan DPRD Kaltim dari Makmur HAPK kepada Hasanuddin Mas'ud. (ay)

## Daya Serap Masih Minim, Jangan Ulangi Kejadian 2020

## Anggaran Covid-19 Rp251 Miliar Harus Maksimal

**SAMARINDA** - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mendorong Pemprov Kaltim untuk memaksimalkan anggaran penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah direncanakan yakni sebesar Rp251 miliar. Menurut dia, anggaran berupa Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah disiapkan itu idealnya dapat dimaksimalkan penyerapannya.

"Jangan sampai malah enggak kepaik lagi nanti, atau tidak mak-

simal seperti di tahun 2020 lalu," kata Samsun, Jumat (30/7) kemarin.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) asal daerah pemilihan (dapil) Kutai Kartanegara (Kukar) ini mengatakan selama 2021 ini, penyerapan anggaran sangat lambat. Bahkan dari APBD Kaltim 2021, yang terserap baru 20



MUHAMMAD SAMSUN

persen. "Ini laporan terakhir serapan anggaran di Juni lalu saat laporan semester pertama," terangnya.

Memang terdapat banyak kendala dari lambannya proses penyerapan ini, baik itu dalam hal Bantuan Keuangan (Bankeu) maupun lainnya. Justru yang tidak berkaitan dengan hal

itu pun mestinya berjalan lancar. Tetapi nyatanya tidak.

"Kan lucu, enggak ada kendala tapi nyatanya serapan baru segitu," ucapnya.

Karenanya, ia berharap proses percepatan penanganan Covid-19 baik dalam bentuk penanganan maupun bantuan-bantuan dapat segera dilakukan. "Karena masyarakat ini sudah menunggu dan sangat membutuhkannya," tegasnya. (ay)

## Bawaslu: Jangan Ada Perubahan Aturan Mendadak



SINDONWS.COM

HINDARI  
KONFLIK

Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar berharap tidak lagi terjadi perubahan peraturan teknis secara mendadak yang kerap terjadi jelang Pemilu atau Pilkada.

angannya yang dikutip dari situs resmi Bawaslu RI, Jumat (30/7) kemarin.

Fritz mencontohkan ketika Pemilu Serentak 2019 lalu, di mana ada sekitar 7 juta penyelenggara Pemilu hingga tingkat Adhoc. Saat itu, dia mendapat laporan seringnya perbedaan tafsir antar sesama penyelenggara Pemilu di lapangan karena adanya aturan teknis yang berubah dari penyelenggara Pemilu di pusat.

Atas hal tersebut, dia merasa perlu bagi penyelenggara Pemilu untuk memiliki satu kesatuan aturan teknis. Baginya, upaya ini diharapkan nanti tidak lagi menimbulkan perbedaan penafsiran oleh petugas adhoc dalam bertugas.

"Kalau tidak ada satu kesamaan, akan menimbulkan potensi konflik antar penyelenggara sendiri," tukasnya. (sin)

**JAKARTA** - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar berharap tidak lagi terjadi perubahan peraturan teknis secara mendadak yang kerap

terjadi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) ataupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, penyelenggara Pemilu harus memiliki aturan teknis yang

sama ketika tahapan Pemilu dan Pilkada telah berlangsung.

"Konflik-konflik multi interpretasi semacam ini harus segera dihindari," ujar Fritz dalam keter-